

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA



Pro
17:50

2025



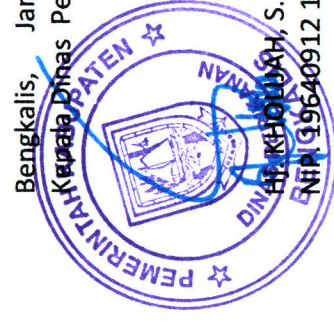
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 dapat terwujud. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

Rancangan Awal Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2021- 2026.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	28
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2025.....	28
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
PENUTUP.....	53
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkulu. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkulu, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkulu dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- 2). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 - 2026;
- 7). Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
 - 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Perikanan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu.
- Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu;
 - 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu;
 - 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
 - 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkulu, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu, kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perikanan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perikanan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah—kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2023 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2023 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 19.828.443.895 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 18.935.973.895 dan Belanja Modal sebesar Rp. 892.470.000. Kedua jenis belanja tersebut digunakan untuk membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Pengadaan Mebel
 - 6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 1.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2.2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 - 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 1.2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - 1.6 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- E. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
- 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 92,57% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember 2023).

Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2021 sebesar 37,27 % dari target 72,45 % (atau 51,44%). Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada tahun 2021 sebesar 75,98% dari target 94,32% (atau 80,55 %)

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun 2021 sebesar 68,86 % dari target 68,78 % (atau 100,11%). Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanian dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) *
 Kabupaten Bengkulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Tabel T-C.29.

Kode	1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output/Sub Output)	TARGET Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan/d dengan tahun 2021	TARGET Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022	TARGET Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah (Renja dan kegiatan tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (T/1 tahun 2024)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	01	01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	01	2	01	Perencanaan Dokumentasi Perangkat Daerah								
	01	2	01	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	8 Dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan pertemuan dan koordinasi sinkronisasi program dan kinerja SKPD	12 kali	6 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	1 kali	50%
	01	2	01	06								

01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan verifikasi program dan kegiatan dikacamatan dalam 1 tahun	66	kecamatan	kecamatan	11	11	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11 kecamatan	-	-	-	
01	2	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam 1 tahun	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	
01	2	03	03	Administrasi Barang	Administrasi Barang																			
01	2	03	02	Pengamanan Barang	1.Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun; 2. Pakaian kerja lapangan tenaga keamanan	108 orang	18	18	17	17	94,44%	94,44%	17 orang	17 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	2	03	02	Pengamanan Barang	Milik Daerah SKPD	108 orang	18	18	17	17	94,44%	94,44%	17 orang	17 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	2	03	01	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
01	2	05	02	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian																			
01	2	05	01	Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis	120 orang	20 orang	24	21	21	87,5%	87,5%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	2	05	01	Implementasi Peraturan	Implementasi Peraturan	120 orang	20 orang	24	21	21	87,5%	87,5%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	2	05	01	Perundang-undangan	Perundang-undangan																			

01	2	06								Perangkat Umum
01	2	06	01							Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
										Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun
01	2	06	02							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										Jumlah Alat Tulis Kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun
01	2	06	04							Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 tahun
01	2	06	05							Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
										Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan pengandaan dalam 1 tahun
01	2	06	09							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Prosentase terlaksananya rapat
										150 media
										25 media
										25 media
										25 media
										100%
										25 media
										-
										-
										96 jenis
										16 jenis
										16 jenis
										100%
										16 jenis
										-
										-
										24 item
										4 item
										4 item
										100%
										4 item
										1 item
										25%

03	2	01	03	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan 1. Jumlah data 6 dokumen ; 90 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 100% ; 1 dokumen ; 15 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03	2	01	01	Persediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan 1. Jumlah data 90 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 100% ; 1 dokumen ; 15 orang	Persediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan 1. Jumlah data 6 dokumen ; 90 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 15 orang ; 100% ; 1 dokumen ; 15 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
03	2	02	03	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

03	2	04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemberitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Prosedur Pemberitan (SOP) Operasional Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	Jumlah standar operasional 3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
03	2	04	02	Pelayanan Pemberitan Kapal Perikanan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	Jumlah pelaku usaha perikanan dalam daftar kapal sampai dengan 10 GT	600 unit	100 unit	-	-	-	-	-	-
03	2	05	01	Pemberitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemberitan (SOP) Operasional Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

03	2	06	02	Pelayanan Penerbitan pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELAAN PERIKANAN BUDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidaya Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	04	2	01	01	Pelayanan Pelayanan dan operasional Prosedur Penerbitan (SOP) Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunkan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunkan Modal	4 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-
03	2	06	02	Persentase penerbitan kapal pendaftaran perikanan sampai dengan 10 GT							Jumlah standar 2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-
04	2	06	02	Pelayanan Penerbitan pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT							Jumlah standar 2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-
04	2	06	02	Pelayanan Penerbitan pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT							Jumlah standar 2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-

04	2	01	02	Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																
04	2	01	02	Pelayanan Perbitan Izin Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Prosentase terlaksananya pelayanan perbitan usaha pembudidayaan Ikan yang Usahanya, lokasi, dan/atau budidaya	2 pelaku usaha	-	2 pelaku usaha	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	2	02	02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																
04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	50 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	10 kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Pembudidaya Ikan	Prosentase terlaksananya pembentukan dan pengembangan Pembudidaya Ikan	20 kelompok	-	21 kelompok	105%	4 kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

																		Daerah Kabupaten/Kota
04	2	03	02															
Pelayanan		Jumlah pembudidayaan ikan kecil yang mengurus TDPK dalam 1 tahun																
Tanda Daftar bagi pembudidayaan ikan kecil yang mengurus TDPK dalam 1 tahun																		
Pembudi Daya Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
04	2	04	04															
Pembudidayaan Ikan																		
04	2	04	01															
Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota																		
04	2	04	02															
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota																		
04	2	04	03															
Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
04	2	04	04															
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budi daya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

04	2	04	05	Pembinaan dan pemantauan ikan budidaya di Darat	Jumlah pembudidaya yang menerapkan CBIB 1 tahun	100	-	20	20	100%	20	pembudidaya	-
04	2	04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan lahan budidaya ikan darat	Jumlah laporan pengembangan, pemanfaatan lahan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
04	2	04	07	Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air budidaya ikan di Darat	Jumlah laporan pengembangan usaha budidaya perikanan melalui bioteknologi	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
05			05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
05	2	01	01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam Kabupaten/Kota									
05	2	01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Perikanan Tangkap	Jumlah kawasan perikanan tangkap yang	30 kawasan	6 kawasan	6 kawasan	2 kawasan	33,33%	6 kawasan	-	-

											Danu, Waduk, Rawa, dan Genangan Atr Lainnya yang dapat Disahakan dalam Kabupaten/Kota					
05	2	01	02	Pengawasan Usaha Bidang Pmbudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Atr Lainnya yang dapat Disahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah usaha pertanian budidaya yang diawasi dalam 1 tahun	30 kawasan	-	6 kawasan	-	-	-	-				
06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil												
06	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha dan Informasi Usaha dan Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	Jumlah laporan data dan informasi usaha dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-			
06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												

06	2	02	01	06	2	03	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Frekwensi bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pengolahan dan pemasaran														
06	2	03	01	06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
06	2	03	01	06	2	03	01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten/kota	Jumlah pemberian pangan berbasis ikan 12000 orang	350	500	500	300	60%	500	-	-	-	-	-	-	-	-
06	2	03	02	06	2	03	02	Pemberian fasilitas bagi usaha pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam 1 tahun daerah Kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam 1 tahun	-	10 kelompok	7 kelompok	70%	10 kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu sampai akhir Desember 2023, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu kewenangan kabupaten yang terbatas dalam pengelolaan perikanan tangkap di perairan laut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada tahun 2023 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu, diuraikan sebagai berikut :

- a. Produktivitas Perikanan Kelompok Nelayan < 5 GT pada tahun 2023 sebesar 2.563,13 ton dari 6.678 ton atau dengan prosentase capaian sebesar 38,38%.
- b. Pendapatan rata-rata nelayan pada tahun 2023 sebesar Rp. 45,14 juta per tahun dari target sebesar Rp. 41,6 juta per tahun atau dengan prosentase capaian sebesar 108,50%.
- c. Angka konsumsi Ikan pada tahun 2022 sebesar 39,59 kg/kapita/tahun dari target 2022 sebesar 41,87 kg/kapita/tahun atau dengan prosentase capaian sebesar 94,55%.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah			RealisasiCapaian		Catatan Analisis
				(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah total produksi perikanan (ton)			6765	6678	6591	6504	7.734,89	11.061,01	6.591	6.504	
2.	Pendapatan rata-rata nelayan (Rp. juta/tahun)			41,6	43,5	45,6	47,8	45,14	45,14	45,6	47,8	
3.	Angka konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)			41,87	42,11	42,94	43,20	41,39	39,59	42,94	43,20	
4.	Predikat Kinerja Perangkat Daerah			BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam kelaterdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Bengkalis pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

- 1). Maraknya kegiatan budidaya udang vanamei oleh masyarakat pembudidaya ikan di kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, Kecamatan Rupa dan Kecamatan Rupa Utara.
- 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- 3) Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan, dan Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana untuk Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman jumlah tangkapan yang diperbolehkan rata-rata hanya 50% dari potensi yang ada terhadap beberapa jenis ikan atau dengan kata lain telah terjadi over fishing di wilayah perairan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31
 Review terhadap RKPd tahun 2024 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah: Dinas Bengkalis

No	RKPd 2024		Hasil Analisis Kebutuhan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja/Pagu Indikatif	Tarjet Capaian Kinerja/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase pelaksanaan urusan perangkat daerah di Dinas Perikanan	12.706.733.245	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	13.051.575.176	BB	Perangkat Abuntdibinas Kinerja	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Kabupaten Bengkalis dalam 1 tahun	8.335.943.508	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.000.000	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	150.000.000	100%	Kab. Bengkalis	-
Kerjasama dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja S/RPD	Rekrutasi pertemuan koordinasi dan pengkajian	150.000.000	Kerjasama dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja S/RPD	150.000.000	2 kali	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	2 laporan	150.000.000	7 laporan	Kab. Bengkalis	-
Kerjasama dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja S/RPD	Terencanakan monitoring, evaluasi dan verifikasi program dan kegiatan dalam 1 tahun	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	11 kec	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 laporan	150.000.000	100%	Kab. Bengkalis	-
Adminstrasi Barang Milik Daerah	Perentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah	200.000.000	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000	100%	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	18 orang	200.000.000	100%	Kab. Bengkalis	-
Panganon Barang Milik Daerah S/RPD	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	326.400.000	Panganon Barang Milik Daerah S/RPD	326.400.000	18 orang	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	326.400.000	100%	Kab. Bengkalis	-
Kerjasama dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja S/RPD	Perentase penilaian barang milik perangkat daerah dalam 1 tahun	326.400.000	Kerjasama dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja S/RPD	326.400.000	1 dok	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	1 dok	326.400.000	100%	Kab. Bengkalis	-
Penyusunan Barang Milik Daerah pada S/RPD	Jumlah dokumen barang milik perangkat daerah yang terregistrasi dalam 1 tahun	-	Penyusunan Barang Milik Daerah pada S/RPD	-	1 dok	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	-	-	100%	Kab. Bengkalis	-
Adminstrasi Kepogawalan Perangkat Daerah	Perentase peningkatan kapasitas sumberdaye aparatur	89.930.000	Adminstrasi Kepogawalan Perangkat Daerah	89.930.000	100%	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	-	-	100%	Kab. Bengkalis	-
Pegawai Pakelan Dinas Beresita Azbut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang disediakan dalam 1 tahun	-	Pegawai Pakelan Dinas Beresita Azbut Kelengkapannya	-	-	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	-	-	-	Kab. Bengkalis	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dalam 1 tahun	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	20 orang	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	-	-	-	Kab. Bengkalis	-

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase terlaksananya perubahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor	40.625.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Perbaikan komponen Instalasi Listrik/Perkerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Perbaikan komponen Instalasi Listrik/Perkerangan Bangunan Kantor	144.480.000	100%	1.263.960.000	11
2			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		12
3			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
4			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
5			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
6			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
7			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
8			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
9			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
10			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
11			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		
12			144.480.000	Kab. Bengkulu	2 paket	144.480.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144.480.000	100%		

1								12
2								11
3								10
4								9
5								8
6								7
7								
8								
9								
10								
11								
12								

1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						

1	PROGRAM PENGLAAN PERIKAMAN BUDIDAYA	Perentase peningkatan produksi	95,88%	3.993.998.898	Perentase peningkatan produksi	98,75%	6.280.000.000	12
2	Perubahan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98,75%		9
3	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		10
4	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		11
5	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		12
6	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		13
7	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		14
8	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		15
9	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		16
10	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		17
11	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		18
12	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	Perentase terlaksananya pembudidayaan	95,88%	250.000.000	Perubahan Izin Usaha Perikanan dan Prosedur Perizinan Izin Usaha Perikanan	98,75%		19

Berdasarkan review atas RKPD tahun 2025 dan analisa kebutuhan tahun 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat diketahui bahwa kebutuhan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25.106.439.728,- atau lebih sebesar Rp. 4.611.708.688,- dari RKPD tahun 2025 sebesar Rp. 20.494.731.040,- . Kelebihan pagu anggaran tersebut berasal dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari pagu RKPD sebesar Rp. 12.706.733.245 menjadi Rp. 13.051.575.176,-. Kenaikan ini dibutuhkan karena diperkirakan adanya kenaikan harga barang dan jasa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Penggunaan Anggaran tersebut direncanakan untuk :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
 - b. Pembayaran Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operasional Website dan Tenaga Administrasi Kantor
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Gedung dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
 - d. Penyediaan Komunikasi, Listrik, Makanan dan Minum, Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan lainnya untuk operasional kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.500.128.000,- atau lebih besar dari pagu RKPD sebesar Rp. 245.707.486,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan tambatan perahu sebanyak 3 unit
 - b. Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan untuk perairan umum daratan berupa Kapal/Perahu lengkap dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan sebanyak 2 paket(unit)
 - c. Workshop berupa pelatihan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi keluarga nelayan kecil di Kabupaten Bengkalis dan pemberian bantuan penggantian alat tangkap nelayan perairan laut yang mengalami kerusakan. Dimana direncanakan kegiatan workshop dan pemberian bantuan tersebut direncanakan untuk 60 orang nelayan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan kelompok nelayan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 15 kelompok.
 - e. Pemberian fasilitas bantaun pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha untuk 4 unit usaha.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 6.280.000.000,- atau lebih besar dari pagu RKPD sebesar Rp. 2.386.000.102,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk :
 - a. Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan sebanyak 5 unit.

- b. Pemberian bantuan sarana pembudidayaan untuk 15 kelompok/unit pembudidaya ikan.
- c. Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan analisa terhadap kesesuaian lahan budidaya di Kabupaten Bengkalis.
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- yang direncanakan untuk melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum daratan atas 5 kawasan perairan umum daratan di Kabupaten Bengkalis

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan kelautan dan perikanan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Sampai saat ranwal ini disusun, belum ada usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan karena belum ada musrenbang baik itu tingkat desa maupun kecamatan					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perikanan dalam menjabarkan kebijakan nasional telah diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang mengikuti kebijakan daerah yang tertuang didalam RPJMD, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Memelihara keberlanjutan sumberdaya Perikanan;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha perikanan budidaya air payau (brackish water) dan budidaya air tawar;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur Perikanan;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan, budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan melalui pendampingan dan pelatihan serta penyuluhan.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam memanfaatkan sumberdaya Perikanan.
- f. Mengatur usaha perikanan tangkap agar efisien dan lestari.
- g. Mendorong pengembangan usaha pasca panen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 menggunakan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

Tujuan :

I. Meningkatkan produksi perikanan

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi usaha perikanan
Indikator : Jumlah produksi perikanan
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan
Indikator : Angka tingkat konsumsi ikan
3. Pendapatan rata-rata nelayan
Indikator : Jumlah pendapatan rata-rata nelayan

II. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Tahun 2025 sebagai mana Tabel TC-33.

TABEL T-C.33
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju
Tahun 2025 Kabupaten Bengkulu

Kode	Usrusn/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Rencana Tahun 2026
				Target Capaian Kinerja /Pagu Indikatf	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatf		
3. 25. 01.	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8	9	11	13
3. 25. 01. 2. 01.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
3. 25. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		BB	25.106.439.728		23.628.257.437
3. 25. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran dan kinerja		BB	13.051.575.176		13.105.942.486
3. 25. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	2 dokumen	200.000.000		200.000.000
3. 25. 01. 2. 01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	2 laporan	150.000.000		150.000.000
3. 25. 01. 2. 01.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	1 laporan	150.000.000		150.000.000
3. 25. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN	Kab. Bengkulu	100%	8.335.943.508		8.335.942.577
3. 25. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN	Kab. Bengkulu	100%	8.335.943.508		8.335.942.577
3. 25. 01. 2. 02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu		8.335.943.508		8.335.942.577

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

3.	25.	01.	2.	07.	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bengkalis	5 unit	200.000.000		5	
3.	25.	01.	2.	07.	09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 unit	150.000.000		6	
3.	25.	01.	2.	08.	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bengkalis	100%	699.200.000		8	
3.	25.	01.	2.	08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Bengkalis	1 laporan	80.000.000		9	
3.	25.	01.	2.	08.	02.	Jumlah tenaga administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	Kab. Bengkalis	4 orang/bulan	400.000.000		10	
3.	25.	01.	2.	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan	400.000.000		11	
3.	25.	01.	2.	08.	03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan	200.000.000		12	
3.	25.	01.	2.	08.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan	19.200.000		13	
3.	25.	01.	2.	09.	01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perseroan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Bengkalis	100%	1.386.141.668	1.447.744.909	100%	1
3.	25.	01.	2.	09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perseroan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Bengkalis	5 unit	242.000.000	242.000.000	100%	5
3.	25.	01.	2.	09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Kab. Bengkalis	4 unit	122.000.000	122.000.000	100%	4
3.	25.	01.	2.	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bengkalis	10 unit	100.000.000	100.000.000	100%	10
3.	25.	01.	2.	09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bengkalis	6 unit	522.141.668	522.141.668	100%	6
3.	25.	01.	2.	09.	10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Bengkalis	17 orang	200.000.000	200.000.000	100%	7

3.	25.	01.	2.	09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Bengkalis	1 unit	200.000.000	258.744.909	13
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
3.	25.	03.	2.	01.	01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kab. Bengkalis	1 dok	751.628.000	1.429.013.511	3.
3.	25.	03.	2.	01.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat	Kab. Bengkalis	1 dok	751.628.000	751.628.000	3.
3.	25.	03.	2.	01.	02.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan	Kab. Bengkalis	15 orang		323.500.000	3.
3.	25.	03.	2.	01.	02.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Bengkalis	3 unit	723.500.000	323.500.000	3.
3.	25.	03.	2.	01.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Bengkalis	2 unit	525.000.000	353.885.511	3.
3.	25.	03.	2.	02.	01.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase teraksemannya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitas nelayan kecil	Kab. Bengkalis	92,83%	1.500.000.000	675.000.000	3.
3.	25.	03.	2.	02.	01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Kab. Bengkalis	60 orang	950.000.000	125.000.000	3.
3.	25.	03.	2.	02.	02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya	Kab. Bengkalis	15 kelompok	250.000.000	250.000.000	3.
3.	25.	03.	2.	02.	03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Bengkalis	4 Unit Usaha	300.000.000	300.000.000	3.
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
3.	25.	04.					Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)			6.280.000.000	6.280.000.000	3.
3.	25.	03.	2.	02.	03.						1.428,61	3.

3. 25. 04. 2. 04. 05.	05.	04.	2.	04.	05.	04.	2.	04.	05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Kab. Bengkulu	20 orang	50.000.000	20 orang	50.000.000	13
3. 25. 04. 2. 04. 06.	06.	04.	2.	04.	06.	04.	2.	04.	06.	Pencanaan, dan Pengembangan, Pemantauan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan dikembangkan, dimantapkan dan dilindungi	Kab. Bengkulu	1 dokumen	650.000.000	1 dokumen	650.000.000	11
3. 25. 04. 2. 04. 07.	07.	04.	2.	04.	07.	04.	2.	04.	07.	Pencanaan, dan Pengembangan Pemantauan Pemantapan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan pengembangan pemantapan air untuk pembudidayaan ikan di Darat	Kab. Bengkulu	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	9
3. 25. 05. 2. 01.	05.	05.	2.	01.	05.	05.	2.	01.	05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya	Kab. Bengkulu	94,00%	550.000.000	94,00%	550.000.000	10
3. 25. 05. 2. 01.	05.	05.	2.	01.	05.	05.	2.	01.	05.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase teraksananya pengawasan sumberdaya perikanan	Kab. Bengkulu	94,00%	550.000.000	97,00%	407.000.000	11
3. 25. 05. 2. 01.	05.	05.	2.	01.	05.	05.	2.	01.	05.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat disahakan dalam kabupaten/kota	Kab. Bengkulu	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	407.000.000	12
3. 25. 06. 2. 01.	06.	06.	2.	01.	06.	06.	2.	01.	06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan (kg/Kapita/Tahun)	Kab. Bengkulu	4 orang	42,92	4 orang	1.731.301,440	12
3. 25. 06. 2. 01.	06.	06.	2.	01.	06.	06.	2.	01.	06.	Perubahan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Persentase teraksananya perubahan tanda daftar usaha usaha skala mikro dan kecil	Kab. Bengkulu	97,59%	321.926,383	98,18%	321.926,383	13
3. 25. 06. 2. 01.	06.	06.	2.	01.	06.	06.	2.	01.	06.	Penyelesaian Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bengkulu	1 dokumen	321.926,383	1 dokumen	321.926,383	13

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Permendagri ini telah dimulai pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Dinas Perikanan mengemban misi pertama yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian”.

Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan “Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman”, dengan sasaran “Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian Daerah”. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan Misi pertama adalah memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan.

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian di atas, adalah dengan semaksimal mungkin mengupayakan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang secara garis besar meliputi Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Tangkap, dan Tingkat konsumsi ikan masyarakat.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program di Dinas Perikanan ;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 20 kegiatan dan 47 Sub kegiatan
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikator dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 secara total sebesar Rp. 25.106.439.728,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis, Program dan kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel VI.1

**Tabel IV.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4	5	6
	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3. 25. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. 25. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran dan kinerja
3. 25. 01. 2. 01.	01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. 25. 01. 2. 01.	06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. 25. 01. 2. 01.	07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. 25. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
3. 25. 01. 2. 02.	01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3. 25. 01. 2. 03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah
3. 25. 01. 2. 03.	02. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengumuman Barang Milik Daerah
		Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun
3. 25. 01. 2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3. 25. 01. 2. 05.	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3. 25. 01. 2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor
3. 25. 01. 2. 06.	01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
3. 25. 01. 2. 06.	02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
3. 25. 01. 2. 06.	04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

4		5		6	
3. 25. 01. 2. 06. 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 06. 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
3. 25. 01. 2. 06. 11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah tenaga operator website		
3. 25. 01. 2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		
3. 25. 01. 2. 07. 05.	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 07. 09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
3. 25. 01. 2. 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga administrasi kantor		
3. 25. 01. 2. 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 08. 03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
3. 25. 01. 2. 08. 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		
			Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun		
3. 25. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah		
3. 25. 01. 2. 09. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan persorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
3. 25. 01. 2. 09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		
3. 25. 01. 2. 09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		
3. 25. 01. 2. 09. 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah tenaga kebersihan kantor		
3. 25. 01. 2. 09. 10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		
3. 25. 01. 2. 09. 11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		

4		5		6	
3. 25. 03.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	
3. 25. 03. 2. 01.	01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	
3. 25. 03. 2. 01. 01.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat	
3. 25. 03. 2. 01. 02.	02.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan	
3. 25. 03. 2. 01. 03.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	
3. 25. 03. 2. 02.	02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	
3. 25. 03. 2. 02. 01.	01.	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil		Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitas nelayan kecil	
3. 25. 03. 2. 02. 02.	02.	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	
3. 25. 03. 2. 02. 02.	02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	
3. 25. 03. 2. 02. 03.	03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah unit usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
3. 25. 04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	
3. 25. 04. 2. 02.	02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase terlaksananya fasilitasi, pengembangan, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, informasi, pendidikan dan pelatihan pembudidaya ikan kecil	
3. 25. 04. 2. 02. 01.	01.	Peningkatan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	
3. 25. 04. 2. 02. 02.	02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	
3. 25. 04. 2. 02. 04.	04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	
3. 25. 04. 2. 04.	04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	
3. 25. 04. 2. 04. 01.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah tenaga operator dan pendamping budidaya	

4		5		6	
3. 25. 04. 2. 04. 02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3. 25. 04. 2. 04. 03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota			
3. 25. 04. 2. 04. 04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3. 25. 04. 2. 04. 05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat			
3. 25. 04. 2. 04. 06.	Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi			
3. 25. 04. 2. 04. 07.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di Darat			
3. 25. 05. 05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3. 25. 05. 2. 01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengawasannya sumberdaya perikanan			
3. 25. 05. 2. 01. 01.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
		Jumlah tenaga operator kapal pengawas perikanan			
3. 25. 06. 06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)			
3. 25. 06. 2. 01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil			
3. 25. 06. 2. 01. 01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			
3. 25. 06. 2. 02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil			
3. 25. 06. 2. 02. 01.	Peaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko			
3. 25. 06. 2. 03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan pelatihan pengolahan			

4		5		6
3. 25. 06. 2. 03.	01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. 25. 06. 2. 03.	02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2025.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Perikanan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawasan upaya-upaya pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang masih memerlukan upaya keras

4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kelautan dan perikanan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bengkalis, Januari 2024



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis,

H. KHOLIJAH, S.Pd.I
Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 198601 2 001